

KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KAMPUS PERADABAN**By. Syakhrudin. DN.****Dosen Jurusan PMI/Kesos Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar*****Abstract:***

Social work as charity work, helping each other, helping people in distress, is already underway and institutionalized since ancient times based on human values and needs of the social conditions of society at the time as hunters, sailors, and farmers. When Buddhism, Hinduism, Islam and Christianity entered the archipelago, reinforcing the values of mutual help with the values of faith.

Keywords : Welfare, Social Civilization

I. Pendahuluan

Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar sebagai salah satu lembaga yang membuka program Pengembangan Masyarakat Islam dengan Konsentrasi Kesejahteraan Sosial (PMI/Kesos) yang telah memasuki tahun kelima dan telah melahirkan begitu banyak calon pekerja sosial (*Social Worker*). Di Usia yang masih muda ini, masih saja ada yang mempertanyakan tentang hakekat dan keberadaan pekerjaan sosial dengan berbagai varian penyebutannya. Salah seorang pakar pekerjaan sosial Bapak Holil Solaiman dalam berbagai uraiannya mengatakan ;

Sebenarnya pekerjaan sosial sebagai pekerjaan amal, tolong menolong, membantu orang yang kesusahan, sudah berlangsung dan melembaga sejak jaman purba berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan kebutuhan kondisi sosial pada waktu itu sebagai masyarakat pemburu, pelaut, dan petani. Ketika agama Budha, Hindu, Islam dan Kristen masuk ke wilayah Nusantara, memperkuat nilai-nilai tolong menolong dengan nilai-nilai keimanan.

Penjajah Belanda (1601-1942) dan Balatentara Jepang (1942-1945) tidak memperkenalkan dan mawariskan baik istilah maupun lembaga kesejahteraan sosial dan *social work* kepada masyarakat Indonesia.

Bung Karno dalam pidato (tgl 1 Juni 1945) tentang Dasar Falsafah Negara Indonesia merdeka, pertama kali memperkenalkan asas kesejahteraan, yaitu bahwa tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka, juga tidak akan dibiarkan “kaum kapitalis merajalela”. Apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalnya merajalela, atau yang semua rakyatnya sejahtera, cukup makan, pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh ibu pertiwi.

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem negara Kesejahteraan dalam Pembukaan, Alinea Empat “.....dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.... serta dnegan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” , dan judul Bab XIV “Kesejahteraan Sosial”, Pasal 27, Pasal 33 dan Pasal 34. Namun sistem negara kesejahteraan Indonesia berdasarkan dan sebagai bagian dari demokrasi ekonomi., sistem negara kesejahteraan kapitalis barat, sebagai lampiran dari demokrasi kapitalis.

Kementerian Sosial, sebagai salah satu dari 12 fortfolio dari Kabinet RI pertama, dengan menteri **Mr. Iwa Koesomasoemantri**, tidak mewarisi prasarana, sarana, dan personel baik dari pemerintah kolonial Belanda maupun Jepang.

II. Pembahasan

Pembentukan Kementerian Sosial RI, merupakan prakarsa dan inovasi para Bapak Bangsa, untuk menyelenggarakan sistem negara kesejahteraan tercantum dalam UUD 1945. Sebagai kementerian baru, Kemensos membutuhkan banyak pegawai dan harus merekrut sendiri pegawai-pegawainya.

Maka direkrutlah pegawai dari para bekas pejuang kemerdekaan, banyak diantaranya yang buta huruf. Untuk menangani permasalahan sosial yang besar, berat dan kompleks (3,5 juta pengungsi, ribuan bekas tawanan perang, cacat veteran, repatriasi, kemelaratan, kelaparan, dll,) pada tahun 1950an Kementrian Sosial mendirikan kursus: **KDSA (Kursus Dinas Sosial Atasan di Bandung**, KDSA ditingkatkan menjadi kursus satu tahun, dengan nama **KKST (Kursus Kejuruan Sosisl Tinggi)**, yang kemudian ditingkatkan menjadi KKST dua tahun, yang selanjutnya pada awal tahun 1960an ditingkatkan menjadi program pendidikan *degree* tiga tahun (Sarjana Muda), bagi para pegawai Kementerian Sosial.

Sementara itu, pada pertengahan tahun 1950an didirikan **Balai Pendidikan dan Latihan Tenaga Sosial (BPLTS)** di Yogyakarta untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan jangka pendek bagi para pegawai menengah atas Kementerian Sosial. Pada tahun 1960an didirikan Kursus-kursus pelatihan bagi para pegawai menengah (Kursus Tenaga Sosial/KTS) di Jayapura, Kupang, Makasar, Banjarmasin, Malang, Jakarta, Palembang, dan Padang Sampai tahun 1950an, Kemensos tidak mengenal dan memperkenalkan istilah kesejahteraan sosial, *social work* dan *social worker*, melainkan hanya kursus dinas sosial, kursus kejuruan sosial, tenaga sosial.

Baru pada awal tahun 1960an ketika didirikan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial dan khalayak luas mengenal istilah kesejahteraan sosial (namun difahami sebagai kondisi sejahtera, bukan sebagai serangkaian kebijakan dan program seperti dirujuk dalam pengertian resmi *social welfare*, atau *welvaart*).

Padahal Bung Karno sudah memerkenalkannya sejak sebelum proklamasi kemerdekaan. Istilah pekerjaan sosial, *social work*, baru muncul dalam nama mata kuliah di STKS, seperti metoda-metoda *social work*.

Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, pada awal tahun 1950an mendirikan **SPSA (Sekolah Pkerjaan Sosial Atas)**, dengan demikian Kemendikjarbud lebih dahulu dari Kemensos memperkenalkan istilah *social work*. Dengan demikian sebenarnya yang memerkenalkan istilah pekerjaan sosial pertama kali adalah **Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK)**, bukan **Kementrian Sosial**.

Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Muhammadiyah (UMJ) Jakarta, disusul oleh Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, mendirikan Jurusan Kesejahteraan Soisial mengopi program pendidikan kesejahteraan sosial dari STKS, yang selanjutnya dikopi ulang oleh sejumlah perguruan negeri dan swasta lainnya di seluruh Indonesia.

Sementara itu Universitas Gajah Mada (UGM) mendirikan Jurusan Sosiatri. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung (sekarang Universitas Pendidikan Indonesia/UPI) mendirikan Jurusan Pendidikan Masyarakat, kemudian diubah menjadi Jurusan Ilmu Pendidikan dan Pekerjaan

Kemasyarakatan (IPPK), selanjutnya diubah menjadi Jurusan Pendidikan Sosial, dan sekarang Jurusan Pendidikan Luar Sekolah.

Hanya Akademi Pekerjaan Sosial Widuri (sekarang Sekolah Tinggi) yang ajeg menggunakan kata Pekerjaan Sosial. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi pemerintah dan swasta membuka program pendidikan *social work* menurut visi dan versinya masing-masing, hampir semua universitas sampai sekarang menggunakan label kesejahteraan sosial.

Demikian halnya di Universitas Islam Negeri Makassar, melalui jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Konsentrasi Kesejahteraan Sosial kini mulai mengepakkan sayap menuju pengembangan profesi yang secara bertahap dan pasti akan mencetak pekerja-pekerja sosial di Kampus Peradaban Makassar,

Lebih lanjut Bapak Holil Soelaiman dalam uraiannya mengatakan, berbeda dengan di negara-negara kapitalis Barat, lahirnya *social work* dan *social worker* bergerak dari sisi *demand*, sebagai tanggapan atas permintaan pasar pada ahir abad ke 19, (*Kebutuhan Charity Organization Societies (COS)*) yang dikontrak oleh pemerintah AS untuk menagani permasalahan sosial perkotaan yang merebak akibat Revolusi Industri (1760-1840). COS-COS tersebut membutuhkan banyak *social worker* terlatih, karenanya menyelenggarakan pelatihan *social worker* sendiri secara magang, selanjutnya tugas pelatihan dan pendidikan *social worker* dilakukan oleh lembaga pendidikan seperti *New York School of Philanthropy*.

Di Indonesia pembentukan *social worker profesional* bergerak dari sisi pasokan (*supply side*), dengan pasar tunggalnya Departemen Sosial (Depsos). Depsos nampaknya lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan akan personil staf birokrat kementerian, lembaga-lembaga, kantor-kantor wilayah dan kantor departemen, dari pada kepada membangun dan memperkuat mempertegas peran-peran dan fungsi-fungsi profesional *social work*.

Dalam merekrut calon personilnya Depsos menampung lulusan SMA dan sekolah-sekolah kejuruan menengah atas, serta lulusan s.rjana muda dan sarjana muda segala jenis. Lulusan STKS dan lembaga pendidikan *social work/kesejahteraan sosial*, sebagian terbesar direkrut oleh Kementerian Sosial namun pada umumnya diperlakukan, diberi tugas dan fungsi sama dengan *recruitee* lulusan sarjana muda dan sarjana lainnya.

Sehingga pasar bagi produk pendidikan profesional *social work* di lingkungan Depsos tidak berkembang. Sementara itu, lembaga-lembaga pelayanan kesejahteraan sosial/pelayanan sosial nir-pemerintah sampai sekarang terus menggunakan dan merasa nyaman dengan tenaga relawan, pada umumnya karena pertama tidak berorientasi kepada pelayanan profesional, kedua, tidak mampu membayar tenaga *social worker profesional* oleh karena sumber dananya yang pada umumnya pas-pasan dan tidak pasti.

Sedangkan pemerintah tidak menyediakan subsidi anggaran dan personil profesional bagi lembaga-lembaga kesejahteraan/pelayanan sosial tersebut. Sehingga lembaga-lembaga kesejahteraan/pelayanan sosial nir-pemerintah tidak menjadi pasar bagi produk pendidikan profesional *social worker*, seperti di negara-negara industri maju Barat.

Selanjutnya program pendidikan STKS dan perguruan tinggi lainnya lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan akan calon pegawai (kantor)/staff Kemensos, dari pada kepada menyediakan dan mempersiapkan tenaga profesional *social worker*.

Kemensos pada tahun 1950an -1970an yang diawaki sebegini besar oleh para pejabat yang tidak berlatar pendidikan *social work*, terkesan tidak memahaminya akan tenaga

profesional social worker. Pada ahir-ahir ini, ketika pemerintah mencanangkan kebijakan “**kerja berbasis kompetensi**”, baku mutu kinerja, kesanggupan dan kemangkusan program dan anggaran, kinerja terukur, sertifikasi dan akreditasi profesi, baru Kementerian Sosial pontang-panting merumuskan baku mutu peran, tugas dan fungsi profesi, pemetaan kompetensi profesi serta pembentukan Lembaga Sertifikasi dan Akreditasi.

Sebenarnya menghadapi permasalahan sosial yang luas, besar, berat dan kompleks akibat Pendudukan dan penindasan Balatentara Jepang, Perang Asia Timur Raya, perjuangan menegakkan kemerdekaan, sangat diperlukan penanganan profesional oleh personil profesional yang gayut dalam hal ini social workers, namun karena kurangnya dukungan politik dan kebijakan pemerintah pada saat itu, maka seperti tidak ada kebutuhan akan social work profession dan professional social workers.

Hal ini juga tidak terlepas dari kebijakan dan strategi rekrutmen serta penempatan (*job placement*) pemerintah yang lebih menekankan kualifikasi ijazah dan gelar dari pada kualifikasi dan kompetensi profesional.

Sistem negara kesejahteraan yang dicita-citakan dan dibangun oleh para Bapak Bangsa dan besar, luas, berat serta kompleksnya permasalahan sosial inilah yang menimbulkan *perceived dan expected need* akan profesional *social workers*.

Sayang *perceived dan expected need* tersebut belum menjadi real need baik dari masyarakat (karena masyarakat masih bertumpu pada pranata dan kelembagaan sosial tradisional), maupun dari jajaran pemerintah. Pada tahun 1970an, dengan meningkat pesatnya program-program pembangunan termasuk di bidang kesejahteraan sosial, Kemensos membutuhkan banyak profesional *social workers* namun pada praktiknya rekrutmen dan pelatihan pegawai kemeterian sosial lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan akan pegawai kantor/staff, bukan pegawai profesional.

Kebijakan kerja berbasis kompetensi, sertifikasi dan akreditasi kompetensi profesi termasuk social work, sungguh memberikan harapan dan peluang bagi pengembangan profesi social work. Tantangan yang dihadapi sebenarnya bahkan dahulu pada saat pertama kali pekerjaan sosial diperkenalkan sebagai profesi, tetapi sampai sekarang. Tantang-tantangan tersebut meliputi:

Ketidak tahuan dan tidak adanya pengakuan masyarakat akan keberadaan, tugas, fungsi, peran dan kontribusi karya sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satunya, karena kita dijajah oleh Belanda yang tidak mengembangkan dan melembagakan karya sosial. Berbeda dengan Pilipina yang pernah dijajah Amerika, dan India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia yang pernah dijajah oleh Inggris.

Lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial *nir*-pemerintah (nasional, bukan asing atau internasional)), tidak mempunyai sumber dana yang diperlukan untuk memengerjakan profesional *social worker* sehingga mereka terus tergantung kepada tenaga relawan sampai sekarang.

Pandangan, pemahaman para pembuat kebijakan pada Kementerian Sosial dan Kementerian lainnya yang terkait, sejawat profesi lain, serta masyarakat luas bahwa pekerjaan sosial merupakan *every body's business*, yang siapapun dapat melakukannya.

Pandangan dan pemahaman para pembuat kebijakan pada Kementerian Sosial, bahwa yang diperlukan kementerian adalah tenaga staff, para pegawai kantor, bukan tenaga profesional pelaksana pelayanan/intervensi profesional langsung di lapangan. Belum melembaganya tradisi kerjasama dan saling menghormati serta pendidikan lintas profesi dn lintas program pendidikan. Tidak adanya role model pekarya sosial di lapangan/dilembaga, yang benar-benar bertugas, berfungsi dan berperan sebagai pekarya sosial. Tergantung sebagian tenaga pengajar dan penguji STKS kepada tenaga

pengajar /penguji luar dari perguruan tinggi negeri, yang tidak memahami apa karya sosial, dan tergantungnya STKS kepada pembinaan Dit Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang juga tidak memahami apa karya sosial. Tidak ada atau sangat terbatasnya tenaga kependidikan karya sosial (kelas dan lapangan) yang menguasai pengetahuan teoritik, nilai-nilai karya sosial serta mempunyai pengalaman praktik sebagai pekarya sosial. Serta tidak adanya indigenous *teaching materials*, buku teks dan rujukan, serta bahan pengajaran lainnya yang gayut. Perlunya perubahan orientasi pendidikan tinggi dari kepada ijazah dan gelar kesarjaan kepada pengembangan kompetensi akademis dan kompetensi profesional, Semua ini menjadi tantangan para Dosen dan kelompok pengajar di jajaran Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar yang kini terus mengembangkan Profesi Pekerjaan Sosial di Kampus Peradaban - Samaya Makassar. Selanjutnya apa yang harus kita kerjakan dalam mengembangkan sebuah institusi Sosial, lebih lanjut Holil Soelaiman menuturkan ;

- a. Perlu kesungguhan, ketekunan dan keuletan dari para pelaku profesi *social work* memperkuat kapasitas dan kompetensi profesionalnya, melalui baca buku-buku teks, berselayar di internet, berdiskusi dengan sejawat professional *social workers* dan sejawat profesionalis dilingkungan human *service profession*, baca Jurnal –jurnal *Social Work, International Social Work*, dll serta meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan sejawat profesional *social workers* dari negara-negara lain baik melalui internet, maupun menghadiri international/regional forums, seperti *International ICSW Conference, International IFSW Conference, IASSW international Conference, APASWE Conference, dll.*
- b. Perlu kesungguhan, ketekunan dan keuletan dari para pelaku profesi *social work* mendemonstrasikan kompetensi profesional, serta efektifitas peran dan sumbangannya terhadap pemecahan permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, pembangunan sosial, penegakan keadilan, dan HAM, sehingga peran dan sumbangan profesi *social work* benar-benar difahami oleh masyarakat luas, professionalis lain serta para pejabat pemerintah dan politisi pada berbagai tingkat.
- c. Perlu memperkuat komitmen profesional para pelaku *social work profesion.*
- d. Perlu melakukan penelitian-penelitian evaluatif serta eksperimen-eksperimen intervensi professional *social work*, sehingga dapat dibangun kriteria dan ukuran keberhasilan intervensi.
- e. Melakukan *communication, information and education (CIE) tentang who, what, why, and how social work and social worker*, kepada masyarakat luas melalui media (cetak, elektronik dan interpersonal), secara intensif dan ekstensif.
- f. Memperkuat organisasi profesional *social worker* dan keterlibatannya dalam perumusan program dan kurikulum pendidikan *social work*, penerbitan penyebar-luasan jurnal dan newsletter profesional karya sosial.
- g. Memperkuat program dan lembaga pendidikan profesional sehingga benar-benar menghasilkan *professional social worker yang qualified*, kompeten, dan handal..

JURNAL BERITA SOSIAL

*Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)/Kessos
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*

Edisi I. Desember 2013/ISSN. 23392584

Sumber Naskah

1. *Catatan dari beberapa jurnal terbitan Bapak Holil Soelaiman.*
2. *Edi Suharto, Ph.d dalam membangun masyarakat memberdayakan rakyat.*
3. *Jurnal ilmiah Pekerjaan Sosial Vol V No. 2 November 2006 Tehnologi Pekerjaan Sosial*
4. *DR, H. Asep Usman Ismail, Al-Quran dan Kesejahteraan Sosial.*